

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA****(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Juli 2023/Khusus - Awal Menjabat)**

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ARIO BIMO NANDITO A**
2. Jabatan : **MENTERI**
3. NHK : **899361**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 187.595.355.600**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/249 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 26.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 3623 m2/3838 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HIBAH TANPA AKTA Rp. 114.193.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 488 m2/236 m2 di KAB / KOTA KOTA ---, HIBAH TANPA AKTA Rp. 10.000.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 346.65 m2/346.65 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HIBAH TANPA AKTA Rp. 17.350.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 382.13 m2/382.13 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HIBAH TANPA AKTA Rp. 20.052.355.600

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**Rp. 2.180.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER 4VRZ Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 480.000.000
2. MOBIL, TOYOTA ALPHARD 2.5G Tahun 2019, HIBAH TANPA AKTA Rp. 900.000.000
3. MOBIL, HYUNDAI IONIQ 5 Tahun 2022, LAINNYA Rp. 800.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA**Rp. 6.004.303.070****D. SURAT BERHARGA****Rp. 89.342.924.072****E. KAS DAN SETARA KAS****Rp. 13.393.899.111**



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	298.516.481.853
III. HUTANG	Rp.	16.050.902.195
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	282.465.579.658

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.